

## **Konflik Kamboja dan Pengaruh Perang Dingin di Asia Tenggara**

Nur Kartiko Akbar Arofah<sup>1\*</sup>, Epa Azizaton Ningsih<sup>2</sup>, Janulia Rahma<sup>3</sup>, Fara Fraselina Detia Putri<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM.15, Mendalo Darat, Kab. Muaro Jambi, Jambi  
akbararofah262@gmail.com

### **Abstract**

Between 1955 and 1975, the Indochina Peninsula experienced prolonged bloodshed caused by the confrontation between two major ideologies on Vietnamese territory, leaving profound and lasting impacts that continue to affect Vietnam today. This study aimed to analyze the social and economic impacts of the Vietnam War on Vietnamese society by presenting them through a descriptive historical narrative approach. The research employed a qualitative method, with data collected through a literature review. The findings reveal that the war resulted in millions of deaths, prolonged psychological trauma, widespread poverty, and large-scale migration as major social consequences. Economically, the war caused extensive damage to public infrastructure, which disrupted economic activities and led to declines in national production in the agricultural, industrial, and trade sectors. In addition, the conflict contributed to rising unemployment and economic isolation from several Western countries. Overall, the Vietnam War causes significant deterioration and substantial losses to the social and economic conditions of Vietnamese society.

**Keywords:** Analysis, Vietnam War, Social, Economi

### **Abstrak**

Konflik Kamboja merupakan salah satu konflik paling kompleks di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh dinamika Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang konflik Kamboja, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara, serta peran komunitas internasional dalam proses penyelesaian konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis melalui studi literatur dari berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Kamboja tidak hanya dipicu oleh faktor internal berupa perebutan kekuasaan politik, tetapi juga oleh campur tangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam yang berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Puncak konflik terjadi pada masa pemerintahan Khmer Merah (1975–1979) yang melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, genosida, kerja paksa, dan pembunuhan massal yang menyebabkan sekitar 1,5 hingga 2 juta korban jiwa. Konflik tersebut juga menghancurkan sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara. Upaya perdamaian mulai tercapai melalui Perjanjian Damai Paris 1991 dan pembentukan United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. Kehadiran UNTAC berhasil mendukung proses transisi politik, penyelenggaraan pemilu demokratis tahun 1993, serta rekonstruksi sosial dan ekonomi Kamboja. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Kamboja menjadi contoh nyata bagaimana persaingan geopolitik global dapat memengaruhi stabilitas regional serta pentingnya kerja sama internasional dalam mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi pascakonflik.

**Kata Kunci:** Konflik Kamboja, Perang Dingin, Khmer Merah, UNTAC.

---

Copyright (c) 2026 Nur Kartiko Akbar Arofah, Epa Azizaton Ningsih, Janulia Rahma, Fara Fraselina Detia Putri

✉ Corresponding author: Nur Kartiko Akbar Arofah

Email Address: akbararofah262@gmail.com (Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM.15, Kab. Muaro Jambi, Jambi)

Received 15 May 2026, Accepted 23 May 2026, Published 31 May 2026

## **PENDAHULUAN**

Perang Dingin merupakan periode ketegangan politik, ideologi, dan militer antara Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Uni Soviet dan negara-negara pendukungnya setelah Perang Dunia II. Kedua negara bersaing dalam memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militer melalui pembentukan aliansi seperti NATO oleh Amerika Serikat dan Pakta Warsawa oleh Uni Soviet. Dalam situasi tersebut, beberapa negara memilih berpihak kepada salah satu blok, sedangkan negara lainnya tetap netral melalui Gerakan Non-Blok (Putri, 2022). Persaingan antara dua negara adidaya tersebut

turut memengaruhi kawasan Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berada di bagian selatan Semenanjung Indochina dengan luas wilayah sekitar 182.000 kilometer persegi. Secara geografis, Kamboja memiliki dua bentuk wilayah utama. Pertama, wilayah dataran rendah yang meliputi Delta Mekong dan Danau Tonle Sap yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Kamboja. Kedua, wilayah pegunungan yang berada di bagian barat daya, utara, dan timur laut negara tersebut. Kawasan pegunungan ini sebagian besar dipenuhi hutan lebat serta perbukitan yang mengelilingi dataran rendah Kamboja (Tatara, Margiyati, & Timur, 2023).

Pada masa perang dingin, Kamboja mengalami konflik berkepanjangan yang tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga memengaruhi hubungan politik antarnegara di Asia Tenggara. Selain perang saudara, Kamboja juga menghadapi konflik perbatasan dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear serta persaingan kepentingan di kawasan Sungai Mekong yang dipengaruhi faktor geopolitik dan ekonomi regional (Pottu & Siahaan, 2021). Oleh karena itu, pembahasan mengenai konflik Kamboja penting untuk memahami pengaruh Perang Dingin dan persaingan negara besar terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai peristiwa serta fenomena sejarah yang berkaitan dengan konflik Kamboja dan pengaruh Perang Dingin di Asia Tenggara berdasarkan data nonnumerik berupa sumber tertulis. Pendekatan deskriptif historis digunakan untuk menggambarkan peristiwa Sejarah secara sistematis, kronologis, dan factual. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pembahasan mengenai latar belakang terjadinya konflik, keterlibatan negara-negara besar dalam konflik, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi politik dan keamanan Kawasan Asia Tenggara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara konflik Kamboja dan Pengaruh Perang Dingin di Asia Tenggara.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Latar belakang dan awal konflik Kamboja***

Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berada di bagian selatan Semenanjung Indochina dengan luas wilayah sekitar 182.000 kilometer persegi. Secara geografis, Kamboja memiliki dua bentuk wilayah utama. Pertama, wilayah dataran rendah yang meliputi Delta Mekong dan Danau Tonle Sap yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Kamboja. Kedua, wilayah

pegunungan yang berada di bagian barat daya, utara, dan timur laut negara tersebut. Kawasan pegunungan ini sebagian besar dipenuhi hutan lebat serta perbukitan yang mengelilingi dataran rendah Kamboja (Tatara, Margiyati, & Timur, 2023).

Perang saudara di Kamboja menjadi salah satu konflik paling rumit dan paling banyak menimbulkan korban di Asia Tenggara pada abad ke-20. Konflik yang berlangsung dari tahun 1970 hingga 1998 ini memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik Kamboja. Awal konflik terjadi setelah adanya kudeta militer terhadap Raja Norodom Sihanouk yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Setelah itu, kelompok Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975. Pada masa pemerintahan Khmer Merah, masyarakat Kamboja mengalami penderitaan yang sangat besar. Jutaan orang meninggal akibat kelaparan, kerja paksa, penyakit, dan pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis. Kamboja ikut terlibat dalam persaingan politik dunia pada masa Perang Dingin sehingga konflik di dalam negeri tidak lagi hanya menjadi masalah internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara besar. Pada saat itu, beberapa kekuatan dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja, baik dalam bentuk bantuan militer maupun dukungan politik. Amerika Serikat mendukung pihak yang anti-komunis, sementara Tiongkok dan Uni Soviet mendukung kelompok yang memiliki hubungan dengan ideologi komunis. Keterlibatan negara-negara besar tersebut membuat konflik di Kamboja semakin rumit dan berlangsung lebih lama karena masing-masing pihak berusaha memperluas pengaruh politik dan kekuasaannya di kawasan Asia Tenggara (Sovann, Sutanto, & Halkis, 2024).

Selain konflik internal, Kamboja juga terlibat dalam konflik perbatasan dengan Thailand yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini dipicu oleh perebutan wilayah Kuil Preah Vihear, yaitu kuil bersejarah yang terletak di kawasan Pegunungan Dangkreng, tepat di perbatasan Thailand dan Kamboja. Kuil tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, dan keagamaan yang tinggi bagi kedua negara karena mayoritas masyarakat Thailand dan Kamboja sama-sama beragama Buddha. Selain itu, kawasan di sekitar kuil juga memiliki banyak peninggalan candi kuno sehingga dianggap penting sebagai simbol sejarah dan kedaulatan negara. Perselisihan mengenai kepemilikan Kuil Preah Vihear sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Kamboja ke Mahkamah Internasional (ICJ) setelah upaya negosiasi dengan Thailand tidak menghasilkan kesepakatan. Kemudian pada tahun 1962, ICJ memutuskan bahwa kuil Preah Vihear merupakan milik Kamboja. Namun, wilayah disekitar kuil seluas sekitar 4,6 km<sup>2</sup> belum memiliki batas yang jelas sehingga tetap menimbulkan konflik antara kedua negara. Thailand tidak sepenuhnya menerima keputusan tersebut karena menganggap kawasan kuil memiliki hubungan sejarah dan nasionalisme dengan negaranya. Ketegangan kembali meningkat pada tahun 2008 ketika Kamboja mengajukan Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia UNESCO. Perselisihan ini memicu bentrokan bersenjata pada tahun 2011 yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan wilayah perbatasan, dan pengungsian masyarakat sipil. Dalam upaya penyelesaian konflik, Thailand lebih memilih jalur bilateral tanpa campur tangan pihak luar, sedangkan Kamboja meminta bantuan lembaga internasional.

Akhirnya, Dewan Keamanan PBB menunjuk ASEAN sebagai pihak ketiga untuk membantu memediasi konflik guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara (Pottu & Siahaan, 2021).

Selain konflik perbatasan dengan Thailand, Kamboja juga menghadapi persaingan kepentingan di kawasan sungai Mekong. Sungai Mekong menjadi sumber penting bagi kehidupan kamboja, karena digunakan untuk pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik. Namun, pembangunan bendungan oleh Tiongkok di wilayah hulu sungai Mekong menimbulkan ketegangan dengan negara-negara hilir, termasuk Kamboja. Tiongkok juga melakukan investasi pembangunan bendungan di Kamboja melalui kerja sama Lancang-Mekong Cooperation (LMC). Kondisi ini membuat Kamboja semakin bergantung pada bantuan modal dan teknologi dari Tiongkok. Selain itu, pembangunan bendungan dianggap dapat mengganggu aliran air, lingkungan, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada Sungai Mekong. Persaingan kepentingan wilayah Mekong menunjukkan bahwa konflik di Kamboja tidak hanya berkaitan dengan masalah dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan perebutan pengaruh negara-negara besar di Asia Tenggara (Indrayani, Zulkarnain, & Erawati, 2021).

### ***Pemerintahan Khmer Merah dan Genosida***

Khmer Merah (Khmer Rouge), yang namanya berasal dari kata rouge dalam bahasa Prancis yang berarti “merah”, merupakan organisasi bersenjata yang berafiliasi dengan Partai Komunis Kamboja dan menjadi salah satu rezim paling kontroversial dalam sejarah modern Kamboja. Kelompok ini berhasil mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Lon Nol pada tahun 1975 melalui perjuangan revolusioner dan kemudian memerintah Kamboja hingga tahun 1979. Berlandaskan ideologi komunisme yang sangat radikal, Khmer Merah berupaya membangun masyarakat agraris yang dianggap murni dengan menghapus berbagai unsur yang dipandang bertentangan dengan cita-cita revolusi. Dalam pelaksanaannya, rezim ini menerapkan kebijakan yang keras dan represif terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk kaum intelektual, borjuis, feodal, tokoh agama, serta individu yang dianggap memiliki hubungan dengan sistem lama. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan menimbulkan penderitaan yang luas bagi rakyat Kamboja. Secara organisatoris, Khmer Merah dipimpin oleh Pol Pot yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Kamboja, sehingga memiliki peran sentral dalam perumusan ideologi, strategi politik, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan selama masa kekuasaan rezim tersebut (Rahimin, 2024).

Komunitas Muslim di Kamboja, yang sebagian besar berasal dari etnis Cham dan Melayu, telah lama menjadi bagian dari masyarakat Kamboja sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Sebagai kelompok minoritas di tengah mayoritas penduduk yang memeluk agama Buddha, mereka menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Situasi yang paling sulit terjadi ketika Kamboja berada di bawah pemerintahan rezim Khmer Merah pada periode 1975-1979. Di bawah kepemimpinan Pol Pot, rezim komunis ini menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat otoriter dan represif terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas Muslim. Selama masa kekuasaannya, masyarakat Muslim mengalami berbagai bentuk penindasan yang

berdampak pada pembatasan kebebasan beragama, rusaknya tatanan sosial dan budaya, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan yang dijalankan oleh rezim tersebut tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga mengakibatkan hilangnya anggota keluarga, harta benda, serta warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Muslim Kamboja. (Syidad, 2023).

Khmer Merah merupakan organisasi politik yang berlandaskan ideologi komunisme radikal dan berperan sebagai kekuatan utama dalam gerakan revolusioner di Kamboja. Istilah “Khmer Merah” pertama kali diperkenalkan oleh Raja Sihanouk pada tahun 1960 untuk menyebut kelompok pemberontak komunis yang telah berkembang sejak dekade 1940-an. Sejak awal kemunculannya, kelompok ini aktif menyebarkan pengaruh melalui berbagai media propaganda seperti selebaran dan publikasi politik guna menanamkan doktrin komunis di masyarakat. Perkembangan ideologi mereka semakin kuat seiring dengan meningkatnya semangat nasionalisme dan sentimen anti-kolonial terhadap Prancis. Setelah berhasil memperluas kekuasaan ke wilayah-wilayah yang dihuni masyarakat Muslim Cham, Khmer Merah menerapkan serangkaian kebijakan represif yang menekan kehidupan keagamaan umat Islam melalui Lima Poin Rencana, antara lain mewajibkan perempuan Muslim memotong rambut pendek dan melarang penggunaan jilbab, memerintahkan penghancuran seluruh salinan Al-Qur’an, mewajibkan Muslim Cham memelihara babi, melarang pelaksanaan salat serta menutup semua tempat ibadah Islam, dan memaksa laki-laki maupun perempuan Muslim Cham menikah dengan pasangan non-Muslim. Kebijakan-kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak tahun 1975, bahkan sebelum Konstitusi Khmer Merah disahkan, sehingga menimbulkan tekanan yang sangat berat bagi masyarakat Muslim karena bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, umat Islam tetap dipaksa mematuhi peraturan tersebut di bawah ancaman rezim. Pada 5 Januari 1976, pemerintah Khmer Merah secara resmi mengesahkan Konstitusi Kampuchea Demokrat sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan politik, sosial, dan pemerintahan di bawah rezim tersebut (Julianti, Safitri, & Seprina, 2024).

Setelah berhasil merebut kekuasaan di Kamboja pada 17 April 1975, rezim Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot segera melancarkan berbagai kebijakan radikal untuk mewujudkan masyarakat agraris yang murni sesuai dengan ideologi komunisme mereka. Salah satu kebijakan yang paling dramatis sekaligus kontroversial adalah pengosongan kota-kota besar, terutama ibu kota Phnom Penh. Rezim memaksa jutaan penduduk kota meninggalkan rumah mereka dan dipindahkan secara massal ke daerah pedesaan untuk bekerja sebagai petani. Kebijakan ini didasari keyakinan bahwa kehidupan perkotaan merupakan lambang kapitalisme, eksploitasi, dan pengaruh asing yang harus dihilangkan sepenuhnya guna mewujudkan konsep “Year Zero” atau “Tahun Nol”, yaitu membangun ulang seluruh tatanan masyarakat dari nol tanpa meninggalkan jejak sistem lama. Akibatnya, masyarakat terpaksa menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki menuju kamp-kamp kerja paksa dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sehingga banyak korban meninggal dunia karena kelaparan, penyakit, kelelahan, serta minimnya akses kesehatan. Kebijakan pengosongan kota ini juga diiringi penghapusan kepemilikan pribadi, penutupan pasar, dan pengendalian negara yang mutlak atas seluruh aspek kehidupan masyarakat (Putri & Rinda, 2023).

Selama masa pemerintahan Khmer Merah antara tahun 1975-1979, masyarakat Muslim Kamboja mengalami berbagai bentuk tekanan sosial, politik, dan keagamaan yang sangat berat. Rezim ini menerapkan kebijakan-kebijakan represif yang tidak hanya menghilangkan rasa aman masyarakat, tetapi juga merusak tatanan kehidupan sosial yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Komunitas Muslim menjadi sasaran diskriminasi melalui berbagai pembatasan yang menyebabkan hilangnya hak-hak dasar, kebebasan beragama, harta benda, serta identitas budaya mereka. Berbagai praktik keagamaan dilarang, termasuk penggunaan atribut keislaman, pelaksanaan ibadah, dan aktivitas keagamaan lainnya, sementara kitab suci Al-Qur'an dimusnahkan, para pemimpin agama dieksekusi, dan banyak permukiman Muslim dihancurkan. Masyarakat yang berusaha mempertahankan keyakinan atau menentang kebijakan tersebut sering kali dianggap sebagai ancaman bagi negara dan menjadi korban tindakan kekerasan yang semakin memperburuk kondisi psikologis maupun sosial mereka. Akibatnya, komunitas Muslim Kamboja mengalami penderitaan yang mendalam dan trauma berkepanjangan sebagai dampak dari penindasan sistematis yang dilakukan rezim Khmer Merah. Setelah rezim tersebut runtuh pada tahun 1979, Kamboja memasuki fase pemulihan yang ditandai dengan perubahan penting dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan. Pemerintah baru mulai mengembalikan kebebasan beragama, memberikan pengakuan terhadap Islam sebagai salah satu agama yang dilindungi negara, serta membuka kembali masjid dan lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya ditutup (Abdalla, A. U. A., & Said, G. 2024).

#### ***Pelanggaran HAM Berat selama Konflik Kamboja***

Pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan ketika Khmer Rouge berkuasa pada periode 1975–1979. Rezim ini memiliki tujuan untuk mengubah Kamboja menjadi masyarakat agraris komunis yang sepenuhnya bebas dari pengaruh kapitalisme, agama, pendidikan modern, dan budaya asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang sangat represif dan tidak menghormati hak-hak dasar manusia. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukan adalah pengosongan kota-kota besar. Setelah berhasil menguasai ibu kota Phnom Penh pada April 1975, jutaan penduduk dipaksa meninggalkan rumah mereka dan berjalan menuju daerah pedesaan. Perintah tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, maupun kebutuhan masyarakat. Banyak orang lanjut usia, anak-anak, dan pasien rumah sakit meninggal dalam perjalanan akibat kelelahan, kelaparan, dan kurangnya perawatan medis (Devy, O. A., & Sholikah, D. I. 2026).

Rezim Khmer Rouge juga menghapus hampir seluruh kebebasan sipil masyarakat. Pendidikan formal dihentikan, sekolah ditutup, dan kegiatan keagamaan dilarang. Para biksu Buddha dipaksa meninggalkan kehidupan keagamaan mereka, sementara tempat-tempat ibadah dihancurkan atau dialihfungsikan. Pemerintah menganggap agama sebagai ancaman terhadap ideologi revolusi sehingga banyak pemuka agama menjadi korban penangkapan dan pembunuhan. Kelompok intelektual menjadi sasaran utama penindasan. Guru, dosen, dokter, pengacara, pegawai pemerintah, serta siapa pun yang dianggap memiliki pendidikan tinggi sering kali dicurigai sebagai musuh revolusi. Bahkan seseorang

dapat dituduh sebagai intelektual hanya karena memakai kacamata atau mampu berbicara dalam bahasa asing. Ribuan orang ditangkap dan dipenjara tanpa proses hukum yang jelas (Julianti, Safitri, Y., & Seprina, R. 2024).

Dalam Tarumingkeng, G. (2025), menjelaskan bahwasanya Banyak tahanan kemudian dikirim ke pusat penyiksaan terkenal, yaitu Tuol Sleng Genocide Museum yang dahulu dikenal sebagai Penjara S-21. Di tempat ini para tahanan mengalami interogasi brutal untuk memaksa mereka mengaku sebagai pengkhianat negara. Setelah menjalani penyiksaan, sebagian besar tahanan dibawa ke lokasi eksekusi yang kemudian dikenal sebagai "Killing Fields". Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa rezim Khmer Rouge secara sistematis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kerja paksa, dan pembunuhan massal. Selain itu, kelompok minoritas etnis seperti masyarakat Vietnam, Tionghoa, dan Muslim Cham mengalami diskriminasi serta kekerasan yang sangat berat. Banyak komunitas minoritas dihancurkan, dipaksa meninggalkan identitas budaya mereka, atau dibunuh secara massal. Karena tindakan tersebut dilakukan secara sistematis terhadap kelompok tertentu, sejumlah akademisi dan lembaga internasional mengategorikannya sebagai tindakan genosida.

#### ***Korban Jiwa dalam Jumlah Sangat Besar***

Konflik Kamboja menimbulkan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling mematikan pada abad ke-20. Berbagai penelitian memperkirakan bahwa antara 1,5 hingga 2 juta orang meninggal dunia selama masa pemerintahan Khmer Rouge. Jumlah ini setara dengan sekitar 20-25 persen dari total populasi Kamboja saat itu. Kematian terjadi melalui berbagai cara. Sebagian besar korban dieksekusi secara langsung karena dianggap sebagai musuh revolusi atau dicurigai memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Banyak orang dibunuh tanpa proses pengadilan dan tanpa kesempatan membela diri. Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran kecil sekalipun dapat dijatuhi hukuman mati (Intan, M. F. 2022).

Namun demikian, eksekusi bukan satu-satunya penyebab tingginya angka kematian, Rahimin (2024), Menjelaskan bahwasanya kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan Khmer Rouge juga menyebabkan kelaparan massal. Masyarakat dipaksa bekerja di lahan pertanian kolektif selama berjam-jam setiap hari dengan jatah makanan yang sangat minim. Dalam banyak kasus, pekerja hanya memperoleh sedikit nasi atau bubur yang tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi mereka. Kondisi ini menyebabkan ribuan orang meninggal akibat kekurangan makanan dan malnutrisi. Penyakit juga menjadi penyebab kematian yang signifikan. Sistem kesehatan hampir tidak berfungsi karena rumah sakit ditutup dan tenaga medis banyak yang dibunuh atau dipenjara. Penyakit seperti malaria, disentri, tuberkulosis, dan berbagai infeksi lainnya menyebar dengan cepat di kamp-kamp kerja paksa. Karena kurangnya obat-obatan dan fasilitas kesehatan, banyak penderita tidak dapat memperoleh perawatan yang memadai. Korban jiwa juga terus bertambah akibat konflik bersenjata yang berlangsung setelah jatuhnya Khmer Rouge pada tahun 1979. Perang antara pemerintah baru yang didukung Vietnam dan kelompok-kelompok perlawanan masih berlanjut selama bertahun-tahun. Ranjau darat yang dipasang

selama konflik menjadi ancaman serius bagi masyarakat sipil bahkan setelah perang berakhir. Hingga kini, Kamboja masih termasuk negara yang pernah memiliki tingkat pencemaran ranjau darat yang tinggi, menyebabkan ribuan korban meninggal atau mengalami cacat permanen (Intan, M. F. 2022).

### ***Kehancuran Ekonomi Akibat Perang***

Selain menimbulkan bencana kemanusiaan, konflik Kamboja juga menyebabkan kehancuran ekonomi yang sangat parah. Sebelum konflik mencapai puncaknya, Kamboja sebenarnya memiliki sektor pertanian dan perdagangan yang cukup berkembang. Namun perang yang berkepanjangan menghancurkan hampir seluruh fondasi perekonomian negara. Ketika Khmer Rouge mengambil alih kekuasaan, seluruh sistem ekonomi modern dibubarkan. Pemerintah menghapus penggunaan uang, menutup bank, membubarkan pasar, dan melarang aktivitas perdagangan bebas. Seluruh alat produksi dikuasai negara dan masyarakat diwajibkan bekerja dalam sistem pertanian kolektif. Kebijakan ini bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, tetapi dalam praktiknya justru menyebabkan keruntuhan ekonomi nasional (Tokan, & Subandi, Y. 2026).

Kerugian ekonomi semakin besar karena hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Ribuan guru, dokter, insinyur, akademisi, dan profesional lainnya menjadi korban pembunuhan atau melarikan diri ke luar negeri. Kondisi ini menyebabkan Kamboja mengalami kekurangan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Setelah konflik berakhir, pemerintah menghadapi kesulitan besar dalam membangun kembali sistem pendidikan, kesehatan, dan administrasi negara. Perang yang berlangsung selama puluhan tahun juga membuat investor asing enggan menanamkan modal di Kamboja. Ketidakstabilan politik dan keamanan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. Pemerintah terpaksa bergantung pada bantuan internasional untuk membiayai pembangunan infrastruktur, rehabilitasi pengungsi, dan pemulihan ekonomi nasional. (Tatara, Margiyati, T., & Timur, 2023).

### ***Invasi Vietnam Ke Kamboja tahun 1979***

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang kerap mengalami ketidakstabilan politik. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor geografis yang memicu persaingan wilayah maupun faktor internal berupa perebutan kekuasaan di antara kelompok elit politik. Persaingan tersebut sering menimbulkan konflik yang berdampak pada terganggunya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Pada dekade 1970-an, Kamboja mengalami perang saudara yang dipicu oleh perebutan kekuasaan. Konflik ini semakin memanas setelah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Lon Nol terhadap Pangeran Norodom Sihanouk ketika Sihanouk sedang berada di luar negeri. Lon Nol beralasan bahwa tindakan tersebut diperlukan karena situasi negara dianggap darurat akibat semakin banyaknya infiltrasi pasukan Vietnam Utara ke wilayah Kamboja. Setelah digulingkan, Sihanouk menentang pemerintahan Lon Nol dan memperoleh dukungan dari Tiongkok. Indonesia juga mendorong pelaksanaan Lima Poin Konsensus ASEAN yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ini mencakup penghentian segala bentuk kekerasan, pelaksanaan dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyaluran bantuan kemanusiaan melalui mekanisme

ASEAN, serta kunjungan langsung utusan ASEAN ke Myanmar. Walaupun implementasinya menghadapi berbagai hambatan, terutama karena sikap pemerintah militer Myanmar, upaya tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan konflik tanpa mengabaikan prinsip non-intervensi yang dianut organisasi tersebut. Selain itu, Indonesia juga pernah berperan sebagai mediator dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2011 serta secara konsisten mendukung penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan melalui dialog dan hukum internasional. Partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik kawasan tidak hanya dilandasi oleh semangat menjaga perdamaian, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan nasional (Hasanah, Khairunnisa, Lovina, Erwin, & Rusdi, 2026).

ASEAN merupakan organisasi regional yang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam kawasan maupun dari dinamika internasional. Selain fokus pada kerja sama ekonomi, ASEAN juga memberikan perhatian besar terhadap isu politik dan keamanan, termasuk kejahatan transnasional, sengketa wilayah antarnegara anggota, serta hubungan dengan negara-negara di luar kawasan seperti China, Japan, dan Australia. Oleh karena itu, ASEAN perlu memiliki mekanisme kerja sama yang efektif untuk mencegah konflik mengganggu stabilitas dan integrasi kawasan. Sebagai organisasi regional, ASEAN berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Meskipun Cold War telah berakhir, isu keamanan tradisional yang berkaitan dengan militer tetap menjadi perhatian negara-negara anggota. Bahkan, setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak negara ASEAN meningkatkan anggaran pertahanannya. Letak strategis Asia Tenggara sebagai jalur penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur menjadikan kawasan ini penting dalam transportasi dan perdagangan internasional. Namun, posisi tersebut juga membuat kawasan rentan terhadap berbagai konflik. Kondisi ini mendorong keterlibatan kekuatan besar seperti United States dan China dalam penyelesaian berbagai sengketa keamanan di kawasan, baik melalui kerja sama bilateral maupun melalui ASEAN (Sihotang, Fahrurrozi, M., Tarigan, & Nasution, M. I. S., 2025)

Ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu perdamaian internasional, United Nations umumnya mengutamakan penyelesaian secara damai. Dalam sengketa antarnegara, PBB sering berperan sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan. Sementara itu, dalam konflik bersenjata, langkah yang biasanya didorong adalah penghentian permusuhan melalui gencatan senjata. Selain upaya diplomatik, PBB juga dapat menerapkan berbagai bentuk sanksi terhadap pihak yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sanksi tersebut dapat berupa kecaman diplomatik, embargo militer dan ekonomi. Pembatasan penerbangan serta pelayaran, isolasi diplomatik, hingga tindakan yang melibatkan intervensi militer. PBB telah terlibat dalam penyelesaian berbagai konflik di dunia. Beberapa di antaranya dilakukan melalui resolusi United Nations Security Council, seperti pada penyelesaian perang antara Iran dan Iraq pada tahun 1988 (Lestari, K. A. Y., 2021).

Kajian mengenai diplomasi berkembang pesat setelah disepakatinya Konvensi Wina Tahun 1961. Konvensi ini menegaskan bahwa pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi para diplomat, melainkan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan

fungsi misi diplomatik secara efektif dalam mewakili negaranya. Selain itu, konvensi tersebut juga menegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional tetap berlaku untuk mengatur berbagai persoalan yang belum diatur secara jelas dalam ketentuan-ketentuan konvensi. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, negara penerima memiliki hak untuk sewaktu-waktu menyatakan seorang kepala misi atau anggota staf diplomatik sebagai persona non grata tanpa kewajiban memberikan alasan atas keputusan tersebut. Dalam situasi demikian, negara pengirim harus menarik diplomat yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya dalam misi diplomatik. Status persona non grata bahkan dapat diberikan sebelum diplomat tersebut memasuki wilayah negara penerima. Konvensi ini juga mengatur bahwa gedung perwakilan diplomatik memiliki sifat tidak dapat diganggu gugat (Siagian., Julianda., Fauzi., Septaria, E., & Adepio, I. 2025).

Program UNTAC yang mulai beroperasi pada tahun 1992 memiliki tujuan untuk mendampingi transisi Kamboja menuju perdamaian yang berkelanjutan. Melalui program ini, PBB mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, mendukung proses pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata, serta mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran UNTAC menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru serta memperkuat legitimasi lembaga-lembaga negara. Selain itu, bantuan ekonomi dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa turut mendukung pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Bantuan tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan perbaikan sarana transportasi, fasilitas kesehatan, serta sektor pendidikan yang menjadi kebutuhan mendasar dalam proses pembangunan jangka panjang (Sovann, Susanto, & Halkis, 2024).

### ***Pembentukan UNTAC oleh PBB***

Konflik berkepanjangan di Kamboja sejak 1970-an menyebabkan kehancuran politik dan keamanan akibat perang saudara yang melibatkan Khmer Rouge, pemerintah Republik Rakyat Kamboja, kelompok oposisi, serta campur tangan negara asing. Untuk mengakhiri konflik tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) pada tahun 1992 berdasarkan Perjanjian Damai Paris 1991. Sebagai misi penjaga perdamaian terbesar PBB saat itu, UNTAC bertugas mengawasi gencatan senjata, melucuti pihak yang bertikai, memulangkan pengungsi, dan mempersiapkan pemilu demokratis. Kehadiran UNTAC menjadi langkah penting dalam menciptakan stabilitas politik dan memulihkan kehidupan masyarakat Kamboja yang lama dilanda konflik (Sovann, N., Sutanto, R., & Halkis, M., 2024).

Menurut Murwanto (2025), UNTAC memiliki komponen militer, kepolisian sipil, administrasi sipil, pemilu, hak asasi manusia, rehabilitasi, dan repatriasi pengungsi. Misi ini mencerminkan keterlibatan aktif PBB dalam menjaga stabilitas internasional pasca-Perang Dingin serta melibatkan banyak negara anggota, termasuk Indonesia melalui Kontingen Garuda dan Civilian Police Polri. UNTAC tidak hanya berupaya menghentikan konflik bersenjata, tetapi juga membangun kondisi politik dan sosial yang stabil. Keberhasilannya terlihat dari penyelenggaraan pemilu demokratis tahun 1993,

terjaganya keamanan selama masa transisi politik, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan pemulangan pengungsi. Karena itu, UNTAC menjadi salah satu misi perdamaian PBB yang paling kompleks dan berpengaruh dalam sejarah hubungan internasional modern (Yuanita, A. Z., Ribawati, E., & Sumantri, T. N. A., 2024).

Pembentukan United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) berawal dari kondisi politik Kamboja yang kacau sejak 1970-an. Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah pada 1979, konflik berlanjut akibat perebutan kekuasaan antara pemerintah yang didukung Vietnam dan kelompok oposisi bersenjata. Situasi ini memicu krisis kemanusiaan, meningkatnya pengungsi, serta lumpuhnya pemerintahan dan ekonomi, sehingga mendorong upaya penyelesaian damai melalui diplomasi internasional (Sovann, N., Sutanto, R., & Halkis, M., 2024).

Upaya tersebut menghasilkan Paris Peace Agreements pada 23 Oktober 1991 yang didukung pihak-pihak bertikai serta negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan ASEAN. Perjanjian ini mencakup penghentian perang, pembentukan pemerintahan transisi, pelucutan senjata, pemulangan pengungsi, dan penyelenggaraan pemilu di bawah pengawasan PBB. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk UNTAC melalui Resolusi 745 tahun 1992 untuk mengawasi pemerintahan sementara, menjaga keamanan, dan memastikan pelaksanaan kesepakatan damai. Keberhasilan pemilu tahun 1993 menjadi bukti penting keberhasilan transisi menuju stabilitas politik yang lebih demokratis (Narulita, I., Putri, S., Ramdhana, S. D., & Hotimah, O., 2025).

Indonesia turut berpartisipasi melalui Kontingen Garuda dan polisi sipil sebagai dukungan terhadap perdamaian dunia. Meski mendapat dukungan internasional, UNTAC menghadapi berbagai hambatan, seperti penolakan Khmer Merah untuk melucuti senjata, trauma masyarakat, dan kerusakan infrastruktur yang menghambat stabilisasi keamanan serta distribusi bantuan. Namun, UNTAC tetap dianggap sebagai salah satu operasi perdamaian PBB paling ambisius karena berhasil membawa Kamboja menuju tahap awal perdamaian politik (Murwanto, 2025).

Salah satu tugas utama UNTAC adalah menyelenggarakan pemilu demokratis pertama di Kamboja pascaperang pada Mei 1993. Pemilu ini diikuti sekitar 90% pemilih terdaftar, mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap perdamaian dan pemerintahan yang lebih stabil. Partai FUNCINPEC yang dipimpin Pangeran Norodom Ranariddh memenangkan pemilu, meskipun banyak pihak memperkirakan kemenangan Partai Rakyat Kamboja (CPP). Keberhasilan pemilu ini menjadi pencapaian terbesar UNTAC karena mampu menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah pemilu, dibentuk pemerintahan koalisi antara FUNCINPEC dan CPP serta dipulihkannya monarki konstitusional di bawah Norodom Sihanouk. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, pemilu 1993 menjadi langkah penting dalam rekonsiliasi dan pembangunan kembali Kamboja pascakonflik (Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S., 2022).

Pasca pemilu, Kamboja memasuki tahap rekonstruksi politik melalui pembentukan pemerintahan koalisi dan pengesahan konstitusi baru. UNTAC membantu pembangunan lembaga negara, penguatan

birokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta menciptakan stabilitas keamanan. Berbagai program rehabilitasi juga dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur, memulangkan pengungsi, dan membantu korban konflik kembali menjalani kehidupan normal. Peran UNTAC memberi kontribusi besar terhadap transisi Kamboja menuju negara yang lebih terbuka dan demokratis, meskipun masih diwarnai tantangan politik dan konflik dalam pemerintahan koalisi (Sumbodo, B. T., Ika, S. R., Kamboja, Y., Hasanah, M. D. I., Sri, S., Sri, M., & Ari, K. W., 2024).

Namun, rekonstruksi politik tidak sepenuhnya berjalan lancar. Persaingan kepentingan elite politik terus terjadi dan memuncak pada krisis politik tahun 1997 antara Hun Sen dan Norodom Ranariddh. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Kamboja masih rapuh, sementara keberadaan kelompok bersenjata dan lemahnya institusi negara tetap menjadi tantangan utama pembangunan politik pascakonflik (Lestari, D. F., 2022).

Konflik berkepanjangan di Kamboja menimbulkan dampak sosial yang besar, seperti kehilangan tempat tinggal, kemiskinan, kelaparan, trauma psikologis, serta kerusakan infrastruktur penting seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya. Rezim Khmer Rouge juga meninggalkan luka mendalam akibat genosida dan pelanggaran HAM yang menewaskan jutaan penduduk. Akibatnya, akses pendidikan menurun, layanan kesehatan terbatas, dan jumlah pengungsi meningkat karena banyak warga terpaksa mencari tempat yang lebih aman di dalam maupun luar negeri (Yuanita, I. S., Ardiansyah, M. K., Alkusna, Z. N., Hawadah, N. N., & Prasetyo, D., 2025).

Di bidang politik, Kamboja mulai menerapkan sistem demokrasi multipartai sebagai hasil Perjanjian Damai Paris 1991. Pemilu yang diawasi UNTAC menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka. Meski sempat diwarnai ketegangan politik, sistem pemilu dan lembaga sipil secara bertahap membantu menciptakan stabilitas. Upaya rekonsiliasi juga dilakukan melalui pengadilan terhadap tokoh-tokoh Khmer Rouge yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan. Melalui Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), pemerintah Kamboja dan PBB bekerja sama menegakkan keadilan bagi korban serta memperkuat kesadaran akan pentingnya HAM dan perdamaian (Abimanyu, A. D., 2025).

Walaupun rekonsiliasi berjalan lambat dan menghadapi hambatan politik, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun stabilitas nasional pascaperang. Kamboja terus berupaya memperkuat ekonomi, pendidikan, dan demokrasi sebagai fondasi perdamaian jangka panjang. Pengalaman konflik ini menunjukkan bahwa perdamaian memerlukan pemulihan sosial, penegakan hukum, dan kerja sama internasional yang berkelanjutan (Sumbodo, B. T., Ika, S. R., Kamboja, Y., Hasanah, M. D. I., Sri, S., Sri, M., & Ari, K. W., 2024).

Namun, perkembangan politik Kamboja masih menghadapi tantangan. Dominasi Cambodian People's Party (CPP) di bawah Hun Sen selama puluhan tahun dinilai melemahkan oposisi, membatasi kebebasan pers, dan memunculkan kritik terkait pelaksanaan demokrasi. Sejumlah organisasi HAM internasional menilai proses demokrasi di Kamboja belum sepenuhnya terbuka dan adil meskipun

pemilu telah dilaksanakan secara berkala (Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurcahya, Y., & Syah, M. K. T., 2024).

## **KESIMPULAN**

Konflik Kamboja merupakan salah satu dampak nyata dari persaingan ideologi dan politik global pada masa Perang Dingin. Konflik yang berlangsung sejak tahun 1970 hingga akhir 1990-an tidak hanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan di dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh campur tangan negara-negara besar yang berusaha memperluas pengaruh politik dan ideologinya di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam menjadikan konflik Kamboja semakin kompleks dan berkepanjangan. Masa pemerintahan Khmer Merah di bawah kepemimpinan Pol Pot menjadi periode paling kelam dalam sejarah Kamboja karena ditandai oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia, genosida, kerja paksa, dan kebijakan represif terhadap masyarakat sipil. Akibatnya, jutaan orang kehilangan nyawa, mengalami penderitaan fisik dan psikologis, serta kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Konflik tersebut juga menyebabkan kerusakan besar terhadap sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur negara sehingga menghambat pembangunan Kamboja selama bertahun-tahun.

Upaya penyelesaian konflik mulai menunjukkan hasil melalui Perjanjian Damai Paris tahun 1991 yang kemudian diikuti pembentukan UNTAC oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. Kehadiran UNTAC berperan penting dalam mengawasi gencatan senjata, memulangkan pengungsi, menyelenggarakan pemilu demokratis, serta membantu proses rekonstruksi politik dan sosial di Kamboja. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan politik hingga saat ini, Kamboja berhasil mencapai tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan masa konflik. Secara keseluruhan, pengalaman konflik Kamboja menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada berakhirnya perang, tetapi juga memerlukan rekonsiliasi nasional, penegakan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, serta dukungan kerja sama internasional. Konflik Kamboja menjadi pelajaran penting bagi masyarakat internasional mengenai bahaya konflik ideologis dan pentingnya diplomasi dalam menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik Kamboja dan peran komunitas internasional dalam proses penyelesaiannya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan: 1) pemerintah Kamboja perlu terus memperkuat proses rekonsiliasi nasional melalui pendidikan sejarah, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai dampak buruk konflik bersenjata dan pentingnya menjaga persatuan nasional. 2) komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu menjadikan pengalaman penyelesaian konflik Kamboja sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam menangani konflik di negara lain. Keberhasilan proses perdamaian melalui UNTAC menunjukkan bahwa kerja sama internasional, mediasi politik, dan dukungan pembangunan pascakonflik dapat menjadi instrumen

penting dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian jangka panjang. 3) penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai dampak sosial dan psikologis konflik Kamboja terhadap masyarakat, khususnya generasi pascakonflik. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas kebijakan rekonstruksi ekonomi dan pembangunan demokrasi yang diterapkan setelah berakhirnya konflik. 4) diperlukan peningkatan kerja sama regional melalui Association of Southeast Asian Nations dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Dengan memperkuat diplomasi, dialog, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, stabilitas regional dapat terus terjaga sehingga konflik yang berdampak luas seperti yang terjadi di Kamboja dapat dihindari.

## REFERENSI

- Indrayani, I., Zulkarnain, Z., & Erawati, D. (2021). Hegemoni Tiongkok Atas Sungai Mekong Dan Pengaruhnya Terhadap Negara Di Bagian Hilir: Kamboja, Laos, Thailand, vietnam. *Ilmu dan Budaya*, 42(1), 89-108.
- Lestari, D. F. (2022). Jatuhnya Rezim Khmer Merah dan Kekuasaan Hun Sen di Kamboja Pasca Itu. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16624-16632.
- Pottu, O. Y., & Siahaan, C. (2021). Peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 1-9.
- Putri, T. (2022). Pemerintahan Leonid Brezhnev DI Uni Soviet Dalam Bidang Politik Pada Tahun 1964-1982.
- Sovann, N., Sutanto, R., & Halkis, M. (2024). Strategi Politik dan Militer dalam Penyelesaian Konflik Kamboja: Peran Samdech Hun Sen dalam Rekonsiliasi dan Stabilitas Nasional. *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 10, No. 4, 48-73.
- Tatara, B. A., Margiyati, T., & Timur, F. G. C. (2023). Ancaman Terorisme dan Strategi Penanganannya: Studi Pustaka Strategi Kontra-Terrorisme di Kamboja. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 7(1), 91-100..
- Syidad, A. W. (2023). Islamisasi di Wilayah Indochina: Proses Penyebaran Islam di Wilayah Kamboja, Laos, dan Vietnam. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 141
- Julianti, P. E., Safitri, Y., & Seprina, R. (2024). Masyarakat muslim kamboja pasca rezim khmer merah (1979-1980) sebagai sumber belajar sejarah. *Sajaratun, Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 79-93.
- Rahimin, D. N. A. (2024). Reaksi Malaysia dan Thailand Terhadap Krisis Pelarian Indochina, 1975-1990. *MINDEN Journal of History and Archaeology*, 1(1), 88
- Putri, S. N., & Rinda. (2023). Analisis Tindak Kejahatan oleh Khmer Merah Kamboja Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional. *borobudur law and society journal*, 213.
- Abdalla, A. U. A., & Said, G. (2024). manuver iran dalam kontestasi geopolitik di timur tengah pasca revolusi islam. *carita: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1), 16-36.

- Devy, O. A., & Sholikah, D. I. (2026). Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja 2025:(Perlindungan Sipil dan Batasan Penggunaan Kekuatan). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5025
- Tarumingkeng, I. R. C., Besar, G., & IBM-ASMI, K. S. A. (2025) Refleksi Historis, Filosofis, dan Edukatif tentang Wisata Gelap. 21-22
- Intan, M. F. (2022). Urgensi Kerja Sama Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Hubungan Thailand-Kamboja Pasca Sengketa Kuil Preah Vihear. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 4(1), 20
- Tokan, A. E. A. G., Lape, F. M. I. O., & Subandi, Y. (2026). Evaluasi Peran ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 4(1), 75
- Narulita, I., Putri, S., Ramdhana, S. D., & Hotimah, O. (2025). Illegal fishing di perairan natuna: permasalahan dan upaya penanganannya. *Jurnal Samudra Geografi*, 8(1), 59-68.
- Murwanto, B. T. D. T., & SE, M. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Pengembangan Karier Perwira Menengah TNI Dalam Misi Perdamaian PBB. *Detak Pustaka*, hlm 6
- Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja. *Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 9, 38-62.
- Sumbodo, B. T., Ika, S. R., Kamboja, Y., Hasanah, M. D. I., Sri, S., Sri, M., & Ari, K. W. (2024). Pengelolaan sampah organik dengan biopori dan pelatihan pembuatan kompos untuk mendukung pengurangan sampah di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(3), 335.
- Lestari, D. F. (2022). Jatuhnya Rezim Khmer Merah dan Kekuasaan Hun Sen di Kamboja Pasca Itu. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16624 - 16632
- Yuanita, I. S., Ardiansyah, M. K., Alkusna, Z. N., Hawadah, N. N., & Prasetyo, D. (2025, December). Konflik Thailand–Kamboja dalam perspektif komunikasi: Hambatan diplomatik dan peran ASEAN. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 4, pp. 1093-1115)*.
- Abimanyu, A. D. (2025). Buddhist-Nationalism Dan Paradoks Pembentukan Identitas Multikultural Di Myanmar, Thailand Dan Kamboja. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 4(2), 101-113.
- Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurcahya, Y., & Syah, M. K. T. (2024). Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 126-138.